



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**STUDI ORGANISASI PENGELOLAAN HUTAN KOTA (Studi Kasus di Hutan Kota Yogyakarta)**  
WISNU MURTI, Ir. Djoko Suharno Radite, MS.  
Universitas Gadjah Mada, 2005 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## **STUDI ORGANISASI PENGELOLAAN HUTAN KOTA (Studi Kasus di Hutan Kota Yogyakarta)**

Oleh :  
Wisnu Murti<sup>1</sup>  
Djoko Suharno Radite<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Meningkatnya kepadatan penduduk dan dengan segala aktifitasnya mengakibatkan pengalihfungsian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota dan akibat lebih lanjut adalah semakin tingginya tingkat pencemaran di perkotaan, seperti polusi udara. Dengan pembangunan hutan kota diharapkan akan diperoleh kembali lingkungan yang nyaman, indah, sejuk dan sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan hutan kota di Yogyakarta, mengetahui sistem pengorganisasian pengelolaan hutan kota di Yogyakarta dan menentukan alternatif model pengembangan organisasi pengelolaan hutan kota di Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi langsung dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Kota Yogyakarta setidaknya membutuhkan hutan kota seluas 6.966 ha, sehingga dengan kondisi hutan kota sekarang seluas 383,59 ha, Kota Yogyakarta masih membutuhkan hutan kota seluas 6.582,41 ha. Dengan jumlah penduduk sebesar 514.838 jiwa (2004) maka untuk memenuhi kebutuhan hutan kota yang ideal, setiap penduduk wajib menanam pohon sebanyak 2 batang.

Pengelolaan hutan kota berdasarkan tipenya di Yogyakarta dilaksanakan oleh pihak-pihak baik pemerintah atau individu yang mempunyai wewenang atas lahan dimana tipe hutan kota itu berada dan dilakukan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi satu sama lain. Atas dasar itulah dibuat suatu alternatif model pengelolaan hutan kota di Yogyakarta. Sebagai penanggung jawab pengelolaan adalah walikota dan koordinator utama pengelolaan adalah suatu badan yang disebut Badan Hutan Kota yang terdiri atas *stakeholder* baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengelolaan hutan kota. Kemudian teknis pelaksanaan diserahkan pada pihak-pihak yang mempunyai wewenang pengelolaan lahan dimana hutan kota dapat dibangun. Selanjutnya untuk pengelolaan hutan kota ke depan dilaksanakan dengan beberapa strategi, yaitu : dokumentasi, inventarisasi dan registrasi; identifikasi, analisis geobiofisik dan sosial ekonomi masyarakat; perencanaan dan penetapan program strategis; penjadwalan dan pendanaan; pengembangan; penumbuhan kesadaran publik; dan *advocacy*.

Kata kunci : organisasi, pengelolaan, hutan kota

<sup>1</sup> 00/140285/KT/04671, Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM.

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM.

